

SOSIALISASI ATURAN PORDA DAN MUTASI

Tahapan Perpindahan Atlet Diperjelas

YOGYA (KR) - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIY menggelar sosialisasi aturan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY dan mutasi atlet dengan seluruh anggotanya, baik pengurus daerah (Pengda) cabor dan KONI kabupaten/kota, Rabu (10/6). Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut, KONI DIY memperjelas tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat perpindahan atlet.

“Tahapan-tahapan yang harus dilakukan seorang atlet, klub, Pengkab Cabor hingga Pengda Cabor dalam proses mutasi atlet kembali kami perjelas dalam rapat sosialisasi kali ini. Agar ke depan, tak muncul lagi kasus hingga ke pengadilan seperti kemarin,” tegas Wakil Ketua

Umum (WKU) I KONI DIY, Triyandi Mulkan SH MM kepada *KR* usai pertemuan di KONI DIY.

Penjelasan lebih detail terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses perpindahan atlet ini menurut Triyandi sangat penting untuk dijelaskan dalam pertemuan

teresebut karena seluruh peserta sejak awal tak ingin kasus gugatan ke pengadilan kembali terjadi di Porda mendatang. Terlebih, selama ini aturan perpindahan atlet memang belum dijelaskan secara mendetail.

Untuk itulah, penjelasan mengenai tahapan proses mutasi harus dipahami secara bersama agar tak terjadi masalah. “Dalam buku yang kami bagikan ke seluruh KONI kabupaten/kota dan Pengda tahapan-tahapan itu sudah ada, dan tadi kembali kami jelaskan. Mulai apa yang harus dilakukan atlet yang akan pindah, apa yang dilakukan klub, Pengkab/Pengkot hingga Pengda, kami

paparkan tadi,” tandasnya.

Selain permasalahan mutasi atlet yang pada Porda sebelumnya menyakan persoalan cukup pelik karena hingga masuk ke ‘meja hijau’, Triyandi juga membahas mengenai aturan umum dan aturan khusus pada Porda DIY. Termasuk, aturan yang harus diberlakukan pada Porda seyogianya mengacu pada PON, karena memang Porda tujuannya untuk menjangkit atlet di DIY menuju PON.

Dengan adanya pembahasan terkait aturan-aturan umum dalam Porda, ke depan pelaksanaan Porda bisa lebih baik. “Kalau Porda itu mengacu pada aturan PON, memang ka-



KR-Istimewa

Rapat sosialisasi aturan Porda DIY dan mutasi atlet oleh KONI DIY secara virtual.

mi setuju karena muaranya Porda jelas ke PON. Tapi kami tidak bisa mengacu ke aturan PON 100 persen, karena untuk cabor yang ada di PON saja belum tentu seluruhnya bisa

diakomodir di Porda,” jelasnya.

Jadi, meski tetap mengacu pada PON, namun aturan-aturan tersebut tetap harus melihat kondisi di DIY terlebih dahulu, apa-

kah bisa diterapkan atau memerlukan revisi agar pas diterapkan di DIY. “Termasuk pemberlakuan aturan khusus di masing-masing cabor,” tandasnya. **(Hit)-d**

KAJIAN DAN ANALISIS UU SKN

Dorong DIY Miliki Sekolah Khusus Olahraga

YOGYA (KR) - Mendorong potensi olahraga prestasi, Pemda DIY dirasa perlu untuk membangun Sekolah Khusus Olahraga (SKO). Saat ini hanya tersedia Kelas Khusus Olahraga (KKO) di Kabupaten/Kota yang perannya masih kurang maksimal. Anggota Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati dalam Kajian, Analisis dan Evaluasi UU No 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) di Disdikpora DIY, Rabu (10/6) kemarin, menegaskan setiap provinsi nantinya diharapkan dapat memiliki SKO.

SKO nantinya dapat mempunyai spesifikasi cabang olahraga (cabor) yang sesuai dengan potensi daerah.

Sehingga nantinya, setiap daerah memiliki potensi atlet dan cabor yang berbeda-beda.

“SKO terbuka bagi murid-murid seluruh Indonesia yang memang ingin fokus pada cabor tertentu.



KR-Antri Yudiandiyah

Ketum KONI DIY Djoko Pekik (kiri) dan MY Esti Wijayanti (kanan) dalam diskusi, kemarin.

Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab dalam pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana serta hal-hal lainnya,” kata Esti.

Ia menambahkan, dari acara yang turut dihadiri Prof Dr Djoko Pekik Irianto

MKes AIFO selaku Ketua Umum KONI DIY dan Ir Pramana selaku Ketua Umum KONI Sleman sebagai narasumber tersebut pihaknya ingin menggali informasi dan masukan tentang revisi UU No 3 tahun 2005.

“Semua elemen menyampaikan UU No 3 tahun 2005 tentang SKN memang membutuhkan perubahan, karena sudah terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi terkini. Perubahannya bahkan lebih dari setengah,” tambah Esti lagi.

Hal penting yang perlu mendapat pengawasan serius di antaranya soal alokasi anggaran dari APBN maupun APBD untuk olahraga prestasi. **(Yud)-d**

LANJUTAN LIGA 1 2020

PSS Siap Jalankan Protokol Kesehatan

SLEMAN (KR) - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah menyusun Panduan Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Covid-19 dalam Penyelenggaraan Pertandingan Sepakbola Liga Indonesia Baru (LIB). Protokol tersebut nantinya jadi acuan klub saat kompetisi kembali bergulir dalam situasi *new normal*.

Dalam rancangan terdapat sedikitnya lima hal yakni Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Secara Umum, Pedoman untuk Akomodasi Hotel Saat Tim Melakukan Perjalanan Tandang, Rekomendasi Prosedur untuk Dugaan atau Positif Covid-19, Pedoman untuk Higienis dan Sanitasi Lingkungan serta Kebutuhan Tambahan.

Selain lima hal tersebut, PSSI masih merancang tiga panduan lainnya. Seperti panduan pemusatan latihan Timnas yang berlaku untuk semua kelompok usia, pedoman SSB (sekolah sepakbola), dan pedoman untuk kursus-kursus kepelatihan.

Panduan tersebut masih dalam proses penyusunan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI Yunus Nusi, Wakil Sekjen PSSI Maaika Ira Puspita, Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri, Ketua Tim Medis PSSI dr Syarif Alwi, dokter Timnas Indonesia U-19, dr Dicky M Shofwan, dokter Timnas Indonesia U-16 dr Ifran Ahmad, dan dokter Timnas Putri Indonesia dr Leksolie FoEs.

Dokter tim PSS Sleman

Elwizan Aminuddin menegaskan pihaknya siap untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut ketika kompetisi kembali bergulir. Protokol kesehatan tersebut pun akan dibiasakan untuk seluruh elemen.

Jika sesuai dengan rencana, besar kemungkinan

PSS akan kembali berlatih bersama di Sleman, Juli mendatang. Protokol kesehatan akan langsung dijalankan ketika para pemain kembali ke Sleman, menjalani latihan bersama dan di mess pemain. **(Yud)-d**



KR-Antri Yudiandiyah

Para pemain PSS dalam latihan sebelum pandemi Covid-19.

RAT KONI KOTA YOGYA

Persiapan Porda Jadi Bahasan Utama

YOGYA (KR) - Persiapan Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XVI-2022 diharapkan menjadi bahasan utama pada ajang Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Kota Yogya tahun ini. Dengan menggunakan metode penyerahan buku pengumpulan formulir tanggapan, diharapkan masukan dari

anggota lebih banyak menyoroti pada persiapan menuju Porda DIY.

“Saya berharap usulan anggota dalam RAT ini lebih banyak ke arah persiapan Porda DIY 2022 mendatang. Karena Porda DIY itu akan digelar 2022 dan di tahun 2020 ini masih masa pandemi Covid-19, maka tahun 2021 akan

jadi tahun persiapan menuju Porda DIY tahun 2022,” terang Sekretaris Umum (Sekum) KONI DIY, Drs Agung Nugroho MSi di Kantor KONI Yogya, Rabu (10/6).

Hanya saja, Agung juga berharap kepada semua anggota KONI Yogya agar tetap bisa memahami kondisi keuangan daerah saat ini, mengingat pandemi Covid-19 benar-benar menguras anggaran daerah. Termasuk membuat sejumlah anggaran olahraga dialihkan untuk penanganan pandemi ini, sehingga program-program olahraga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Agung sangat mengapresiasi kinerja KONI Kota Yogya di bawah kepemimpinan Ketum yang baru, Aji Karnanto SE MM yang mampu bekerja cepat

hanya dalam tempo 2 bulan menyiapkan RAT. “Dua bulan kerja keras menyiapkan RAT dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, jelas kinerja yang luar biasa bisa dari kepengurusan anyar ini,” jelasnya.

Sementara itu, Ketum KONI Kota Yogya Aji Karnanto SE MM dalam kesempatan tersebut menjelaskan, pada RAT kali ini pihaknya telah menyiapkan jadwal dalam tiga gelombang berbeda bagi seluruh anggotanya saat hadir dalam kegiatan RAT kali ini. Pasalnya, sebanyak 45 anggota dan 14 koordinator olahraga kecamatan (Korcam) menjadi undangan peserta untuk kegiatan tahunan tersebut.

Seluruh peserta diberikan buku RAT yang berisi materi pertanggungjawaban program dan keuangan 2019 dan program kerja tahun 2020. **(Hit)-d**

KONI KULONPROGO

Optimalkan Kepengurusan Cabor

WATES (KR) - Salah satu sasaran program Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kulonprogo pada masa pandemi Covid-19, yakni mengoptimalkan Pengurus Kabupaten (Pengkab) cabang olahraga (cabor) anggota.

Ketua KONI Kulonprogo Bambang Gunoto SPd kepada *KR* di Wates, Rabu (10/6) menyampaikan, dengan berhentinya segala kegiatan olahraga baik pertandingan maupun kejuaraan karena adanya pandemi Covid-19 membuat KONI Kulonprogo fokus pada pengoptimalan kepengurusan cabor anggota.

“Pengoptimalan ini akan dilakukan, bermula dari kesulitan bidang Data



KR-Dani Ardiyanto

Bambang Gunoto SPd

KONI Kulonprogo dalam pendataan cabor secara *online*. Masih banyak cabor yang belum memasukkan data karena berbagai hal, salah satunya karena cabor belum memiliki tenaga di bidang informasi dan teknologi (IT). Hal ini juga berkaitan dengan kepeng-

urusan cabor anggota yang belum berfungsi optimal,” jelasnya.

Bidang organisasi KONI Kulonprogo akan segera melakukan komunikasi dengan seluruh cabor untuk mengoptimalkan kepengurusan cabor. Tidak hanya membina atlet lewat latihan rutin saja, namun juga mengembangkan jumlah klub anggota dan menjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk pembibitan atlet.

“Pengurus cabor juga harus mendata atlet dan pelatih untuk mengetahui perkembangannya. Dengan hidupnya kepengurusan cabor diharapkan membawa dampak positif pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet,” pungkasnya. **(M4)-d**

PEMBERIAN POIN TIONGKOK DAN HONG KONG

PBSI Anggap Keputusan BWF 'Fair'

JAKARTA (KR) - Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) akhirnya memberikan klarifikasi atas keputusan pemberian poin bagi tim Tiongkok dan Hong Kong dalam kejuaraan Badminton Asia Mixed Team Championships 2021 (BAMTC). Kedua tim ini diberikan poin karena tidak dapat mengikuti turnamen Badminton Asia Team Championships 2020 (BATIC) di Manila, Filipina, karena peraturan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Filipina terkait pandemi Covid-19.

Keputusan ini sempat membuat beberapa negara mengajukan keberatan karena dianggap tidak fair. Poin BAMTC yang didapat Tiongkok dan Hong Kong mencakup nomor ganda campuran. Sedangkan peserta BATIC 2020 tidak mendapat poin dari nomor ganda campuran karena format pertandingan yang dimainkan adalah format Piala Thomas dan Uber yang hanya memainkan nomor tunggal putra, tunggal putri, ganda putra dan ganda putri.

Dalam klarifikasinya, BWF menyatakan bahwa Tiongkok dan Hong Kong akan mendapat poin dari BAMTC 2021, tapi tidak pada nomor ganda campuran karena nomor ini tidak dimainkan pada BATIC 2020. “Ini adalah keputusan yang

fair untuk semua, memang ini yang kami inginkan yaitu kejelasan bahwa nomor ganda campuran tidak akan dihitung. Karena negara lain juga tidak dapat poin dari ganda campuran di BATIC 2020,” ungkap Bambang Roedyanto, Kasubid Hubungan Internasional PP PBSI.

“Setahu saya selain Indonesia, tim Malaysia juga sempat mengajukan pertanyaan serupa kepada BWF. Kami hanya ingin memastikan bahwa keputusannya adil untuk semua,” imbuh Bambang Roedyanto, dilansir badmintonindonesia.org.

Rudy menjelaskan, saat ini BWF juga tengah menggodok aturan tentang jumlah turnamen wajib yang harus diikuti atlet. Wabah Covid-19 membuat banyak negara peserta mengalami keterbatasan dalam pengaturan perjalanan dan lain sebagainya, maka pengaturan ulang mandatory tournament ini dipandang sebagai hal yang cukup krusial.

“BWF akan membuat aturan mengenai ini (jumlah turnamen wajib), tapi sampai saat ini masih belum ada informasi lagi, keputusan resmi akan diumumkan lebih lanjut oleh BWF, kita tunggu saja,” kata Rudy yang juga menjabat sebagai Chair of Event Committee Badminton Asia Confederation. **(Rar)-d**



KR-Adhitya Asros

Ketum KONI Yogya Aji Karnanto SE MM (baju biru) dan Sekum KONI DIY Drs Agung saat meninjau proses penyerahan materi RAT KONI Yogya.